

## BAB III

### PERANG INDONESIA – BELANDA TAHUN 1947

#### A. Kegagalan Perundingan Linggarjati

Disela-sela pertumpahan darah yang terjadi, kedua belah pihak antara pihak Belanda dan wakil-wakil dari Republik berupaya menyelenggarakan perundingan untuk mencapai kata sepakat. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perjuangan bukan hanya dilakukan melalui jalur militer saja, Indonesia harus berjuang mendapat pengakuan dari dunia sebagai negara yang merdeka sehingga perjuangan bangsa Indonesia tidak dianggap sebagai “gerakan nasional” dalam suatu negara jajahan, tetapi sebagai negara yang berdaulat penuh.

Sebelum perundingan politik dimulai, perlu dicapai gencatan senjata terlebih dahulu, dengan adanya front militer yang jauhnya beratus-ratus kilometer maka kontak senjata dan tindak permusuhan lainnya antara tentara Belanda dengan para pejuang Tentara Republik tidak dapat dielakan, kecuali jika ada perintah dari pimpinan tentara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan gencatan senjata diadakan pada tanggal 7 Oktober dan persetujuan itu ditanda tangani pada tanggal 14 Oktober 1946.<sup>1</sup>

Usaha dalam mencapai kesepakatan dibidang politik antara Indonesia dengan Belanda, diadakan Perundingan Linggarjati. Perundingan ini diadakan sejak tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon. Delegasi

---

<sup>1</sup> A.B. Lopian dan P.J. Drooglever (ed), *Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal.16.

Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, dengan anggotanya Max Van Poll, F. De Boer dan H.J. Van Mook. Sedangkan, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir, dengan anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Susanto Tirtoprojo, Dr. A.K. Gani, dan Mr. Ali Budiardo. Sedangkan sebagai penengahnya adalah Lord Killearn, Komisaris Istimewa Inggris untuk Asia Tenggara.

Perundingan politik dimulai di Jakarta, tempat dilaksanakannya perjanjian antara Istana Rijswijk(sekarang Istana Merdeka) dipimpin oleh Syahrir, tempat menginap anggota Komisi Jenderal dengan tempat kediaman resmi Syahrir di Jalan Pegangsaan Timur 56 dipimpin oleh Schermerhorn. Perundingan di Jakarta diadakan empat kali dengan yang terakhir tanggal 5 November. Delegasi Republik Indonesia kemudian menuju ke Yogyakarta untuk memberi laporan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet, setelah itu berangkat ke Linggarjati.

Lord Killearn datang pada tanggal 10 November dengan menumpang kapal perang Inggris HMS Verayan Bay, kemudian dibawa dengan menggunakan perahu motor ALRI ke Cirebon, diantar dengan mobil ke Linggarjati dan di tempatkan di rumah yang terletak dengan rumah penginapan Syahrir. Angkatan Laut Belanda telah mempersiapkan kapal perang H.M Banckert untuk dipakai sebagai tempat penginapan Delegasi Belanda, pada tanggal 11 November Delegasi Belanda datang dengan kapal terbang "Catalin" lalu dibawa ke Banckert. Perahu motor ALRI yang sebelumnya membawa Lord Killearn ke Cirebon di gunakan kembali untuk menjemput Delegasi Belanda dari Banckert, namun

Komandan Banckert menolak dan memita agar Delegasi Belanda dibawa menggunakan perahu patroli, dan permintaan dari Komandan Banckert ditolak oleh komanda perahu motor ALRI. Akhirnya persoalan tersebut dipecahkan dengan diperkenankannya Delegasi Belanda dibawa menggunakan perahu patroli Banckert, tetapi dikawal oleh perahu motor ALRI.<sup>2</sup>

Perundingan pertama pun terlaksana, tetapi berjalan sangat singkat hanya tiga setengah jam saja. Dikarenakan insiden penjemputan Delegasi Belanda di kapal Banckert, mereka sampai Linggarjati pukul 11.00 dan harus kembali lagi ke Banckert jam setengah lima sore. Schermerhorn memutuskan tinggal di Linggarjati karena berpendapat bahwa akan menimbulkan kesan yang kurang baik pada kalangan Indonesia jika kembali ke Banckert.

Lanjut pada perundingan kedua, Delegasi Indonesia pagi-pagi berkumpul di kediaman Syahrir untuk mempersiapkan perundingan pada hari itu. Pasa-pasal rancangan persetujuan dibahas dan direncanakan alasan-alasan yang akan diusulkan. Perundingan kedua berjalan sangat alot dan berlangsung hampir 9 jam, dua persoalan tidak dapat mencapai kesepakatan, yakni soal perwakilan Republik di luar negeri dan soal kedaulatan Negara Indonesia Serikat. Dalam soal pertama, terutama Syahrir mendesak supaya Belanda menerima usulan bahwa Republik Indonesia mempunyai wakil-wakil sendiri di luar negeri. Syahrir berusaha meyakinkan pihak Belanda bahwa perwakilan tersebut terkait pada diakuinya Republik secara *de facto* yang sudah disetujui oleh pihak Belanda, karena salah satu tujuan utama pemimpin Republik dalam perundingan adalah pengakuan oleh

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 17.

negara-negara di luar negeri. Pihak Belanda sangat keras menolak tuntutan Syahrir dengan alasan bahwa dengan demikian Republik dan Belanda dalam hubungan Internasional akan memiliki derajat yang sama. Mengenai soal kedua juga tidak ada kesepakatan, Delegasi Indonesia menuntut agar Negara Indonesia Serikat menjadi negara berdaulat, bukan negara merdeka seperti dinyatakan dalam Rancangan Perjanjian yang dipakai sebagai dasar perundingan.<sup>3</sup>

Pada hari kedua perundinganpun belum dicapai adanya kesepakatan, malamnya atas undangan Presiden Delegasi Belanda berkunjung pada Presiden di Kuningan. Pada kunjungan malam itu, hadir Wakil Presiden, A.K Gani dan Amir Syarifuddin, Syahrir tidak hadir karena sangat lelah dan mengira kunjungan Belanda merupakan kunjungan kehormatan. Presiden kemudian bertanya mengenai jalannya Perundingan, Van Mook menjelaskan bahwa belum tercapai kesepakatan mengenai satu soal saja yakni usulan Delegasi Republik untuk mengubah kata merdeka di belakang kata Negara Indonesia Serikat dalam pasal 2 Rancangan Perjanjian menjadi berdaulat, artinya yang diusulkan oleh Delegasi Indonesia adalah agar NIS akan menjadi negara berdaulat. Lebih lanjut Van Mook menerangkan bahwa selama perundingan Delegasi Belanda keberatan atas perubahan itu, tetapi setelah dibicarakan antara mereka sendiri, mereka akhirnya menyetujui usulan pihak Indonesia. Van Mook tidak mengutarakan bahwa masih ada soal lain yang belum dipecahkan, yaitu mengenai perwakilan Indonesia di Luar Negeri, tetapi Van Mook langsung menanyakan kepada Presiden apakah dengan diterimanya perubahan yang di inginkan Republik oleh pihak Belanda

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 18.

Presiden dapat menyetujui Rancangan Perjanjian seluruhnya. Atas pertanyaan itu Presiden menjawab dengan nada antusias bahwa dia dapat menyetujuinya. Pertemuan tersebut kemudian berakhir.

Mengetahui hal tersebut, Syahrir sangat menyesalkan bahwa Presiden telah menyetujui Rancangan Perjanjian Linggarjati tersebut, padahal mengenai perwakilan Republik di luar negeri belum diputuskan, tetapi Syahrir tunduk pada keputusan Presiden. Akhirnya dalam Rancangan Perjanjian Linggarjati telah tercapai kesepakatan, hasil Perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk Jakarta, yang isinya sebagai berikut:<sup>4</sup>

- Belanda mengakui secara *de facto* Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus sudah meninggalkan daerah *de facto* paling lambat 1 Januari 1949.
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketuanya.

Isi Perjanjian Linggarjati tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama kalangan partai politik, ada yang pro dan ada yang kontra. Walaupun menimbulkan banyak perbedaan pendapat, pemerintah mendapat dukungan dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk meratifikasikan

---

<sup>4</sup> Agus N. Cahyo, *Tragedi Westerling: Sang Pembantai Rakyat Indonesia* (Jakarta: Palapa, 2014), hal. hal. 30.

persetujuan Linggarjati tersebut. Selain itu kekuatan pemerintah Republik dan Delegasinya dalam perundingan ialah rakyat Indonesia yang dengan tegas menolak untuk dijajah kembali.

Walaupun Perjanjian Linggarjati sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun hubungan Republik Indonesia dengan Belanda masih tetap meruncing karena adanya perbedaan penafsiran yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Tujuan utama pemerintah Republik Indonesia dalam perundingan tersebut adalah pengakuan oleh negara-negara di luar negeri. Selain itu Delegasi Indonesia juga menuntut agar Negara Indonesia Serikat menjadi negara berdaulat, bukan negara merdeka, seperti dinyatakan dalam Rancangan Perjanjian yang dipakai sebagai dasar perundingan.<sup>5</sup> Ternyata Belanda memiliki penafsiran yang berbeda bahwa kedaulatan untuk seluruh Indonesia harus ada padanya, perubahan yang diinginkan Belanda Republik yang dalam “pemerintah peralihan” harus tunduk di bawah pimpinan negeri Belanda.<sup>6</sup> Perubahan yang diinginkan Belanda tersebut melalui Van Mook disampaikan kepada Indonesia berupa semacam ultimatum, yaitu Republik dalam “pemerintah peralihan” harus tunduk dibawah negara Belanda. Republik tidak dibenarkan mengadakan hubungan diplomatik sendiri, dan republik harus mengizinkan pasukan polisi Belanda masuk ke wilayah untuk mengamankan perusahaan – perusahaan Belanda.

Meskipun terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda, tetapi kedudukan Republik Indonesia di mata Internasional semakin kuat setelah

---

<sup>5</sup> A.B. Lopian dan P.J. Drooglever (ed), *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>6</sup> Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949* (Jakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia, 1998), hal. 28.

perjanjian Linggarjati, karena Inggris dan Amerika memberi pengakuan secara *de facto*. “Linggarjati adalah hujan air es di atas api revolusi,” kata Bung Karno dalam otobiografinya (1965),<sup>7</sup> meskipun Perjanjian Linggarjati sama sekali bukanlah pemecahan yang terbaik, tetapi satu-satunya yang tersedia untuk mengatasi konflik Indonesia – Belanda.

---

<sup>7</sup> A.B. Lopian dan P.J. Drooglever (ed), *Op. Cit.*, hal. 17.

## **B. Agresi Militer Belanda I**

Perundingan yang telah berlangsung telah menimbulkan pesimisme untuk mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Pada tanggal 15 Juli Belanda menyampaikan nota yang bersifat ultimatif, Belanda menuntut agar paling lambat tanggal 16 Juli Republik Indonesia harus menghentikan semua bentuk permusuhan dan TNI harus mengundurkan diri sejauh sepuluh kilometer dari batas daerah yang diduduki Belanda. Pengunduran itu harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1947, nota yang bersifat ultimatif itu tidak pernah dijawab oleh Kabinet Amir Syarifuddin.<sup>8</sup>

Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati tanggal 25 Maret 1947 hanya berlangsung selama 4 bulan. Perjanjian antar kedua belah pihak tersebut pada hakikatnya masing-masing menghendaki lain, pihak Belanda setapak demi setapak memperluas wilayah kekuasaannya dengan jalan membentuk badan-badan resmi dan berbagai aksi lainnya dengan maksud menenyapkan pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu yang bersamaan tentara Belanda di Jawa dan Sumatera dipersiapkan untuk tingkat siaga, dan mulai melancarkan serangan, teror-teror, yang pada akhirnya jelas melanggar perundingan dengan adanya serangan serentak di beberapa daerah di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947.

---

<sup>8</sup> Marwati D. P dan Nugroho N, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indoneisa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 215.

Menyusul dilaksanakannya Agresi Militer Pertama, Van Mook memerintahkan Panglima tertinggi Angkatan Darat Belanda, Jenderal S. Spoor melaksanakan aksi militer saat seluruh penduduk tidur lelap pada hari minggu tanggal 20 Juli 1947 pukul 00.00, Spoor telah mempersiapkan segalanya, sudah mengirimkan komando-komando untuk menyerang, sejak saat itu pasukan-pasukan Belanda dengan persenjatangannya yang lebih canggih dikerahkan menyerbu daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Republik.<sup>9</sup>

Belanda berhasil merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dikantor-kantor staf divisi dan brigade rencana serangan Belanda memperoleh bentuk nyata. Titik berat kekuasaan pasukan Belanda berada di Jawa Barat. Divisi 7 Desember di bawah pimpinan Mayor Jenderal M. Durst Brittberada di daerah sebelah selatan Jakarta, dan pada bulan Mei 1947 rencana operasi di mana-mana sudah dikerjakan, dan awal Juni pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera siap untuk bergerak atas perintah dari Jakarta.

Markas Besar tentara Republik pun bergegas membenahi organisasi dalam rangka tindakan penangkalan. Berbulan – bulan TRI mempersiapkan kubu, rintangan jalan, dan jebakan tank, serta sejauh mungkin memperkuat rintangan alam di medan yang sudah ada. Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang memutuskan untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan laskar-laskar ke dalam satu organisasi tentara. Tanggal 7 Juni 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang

---

<sup>9</sup> Her Suganda, *Rengasdengklok Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 112.

menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni telah di sahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah terbentuknya TNI kini tidak ada dualisme antara reguler dan formasi-formasi ireguler dalam perjuangan bersenjata.<sup>10</sup>

Belanda melakukan Agresi terbuka dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 sekitar pukul 05.30 pagi hari, serangan Belanda atau Agresi Militer berawal dari Jakarta. Di sebelah Tenggara Jakarta, Bekasi dan Cileungsi, Brigade 2 dari Divisi 7 Desember siap untuk melancarkan gerakan ke arah timur dengan sasaran pertama Karawang dan Cikampek.<sup>11</sup> Para pejuang di daerah Karawang merasa yakin bahwa Agresi Militer Belanda akan sampai di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, para pejuang mengadakan persiapan-persiapan dengan melakukan konsolidasi kekuatan seluruh komponen perjuangan untuk menghadapi musuh. Pagi hari semua pasukan telah diperintahkan berada di pos penjagaan masing-masing karena telah diketahui pasukan tentara Belanda telah menembus fron Jakarta Timur dengan pasukan dari Brigade 2 Divisi 7 Desember menggunakan 17 gerbong rangkaian kereta api dengan rangakain depan dan belakang lokomotifnya dipasang meriam. Pasukan Belanda yang terdiri dari infanteri, artileri, zeni dan penjinak ranjau berada di gerbong yang terhalang karung berisi pasir.

Pada tanggal 20 Juli malam menjelang 21 Juli 1947 di Bekasi untuk pertama kali TNI terlibat tembak-menembak, setelah pertempuran sengit upaya untuk mempertahankan lapangan terbang pun dilepaskan oleh pasukan TNI.

---

<sup>10</sup> Marwati D. P dan Nugroho N, *Op. Cit.*, hal. 226.

<sup>11</sup> Pierre Heijboer, *Op. Cit.*, hal. 36.

Belanda semakin bersemangat untuk menguasai wilayah Utara Jawa Barat, untuk memasuki Tambun pasukan Belanda bertempur kembali dengan para Pejuang Republik. Di daerah Tambun rombongan pasukan tentara Belanda mendapatkan perlawanan ketika akan melewati garis demarkasi dari TNI Batalyon Beruang Merah yang dipimpin oleh Kapten Sani Lupias, sehingga pertempuran yang cukup sengit tersebut membuat jatuh banyak korban di kedua pihak. Namun, pertahanan Beruang Merah di Tambun amat lemah, sehingga sangat mudah ditaklukkan Belanda. Kemudian, kereta api yang membawa rombongan tentara Belanda melanjutkan perjalanan memasuki stasiun Cikarang, pasukan TNI menembaknya dengan mortir, namun kereta terus melaju menuju Karawang dengan kawalan dari pesawat Mustang. Selama dua hari tentara Belanda berhasil melewati Tambun serta Cikarang dan sampai di Karawang, sebelum melewati jembatan Kedunggedeh, Citarum yang menghubungkan kabupaten Bekasi dan Karawang, kereta api pasukan Belanda berhenti terlebih dahulu. Nampaknya Belanda sudah tahu bahwa di jembatan tersebut telah disiapkan 38 bom ranjau untuk diledakan ketika kereta api pasukan Belanda melintas. Belum sempat diledakan, 3 orang perajurit TNI yang bertugas meledakkan bom tersebut gugur di tembak dari atas oleh pesawat Mustang AU Belanda dengan tembakan Salvo Senapan.<sup>12</sup> Tetapi TNI tidak kehabisan akal, dari arah yang berlawanan dengan kereta yang membawa tentara Belanda, para pejuang melepaskan lokomotif dari stasiun Karawang tanpa ada masinisnya untuk menghalang rangkaian kereta api yang dinaiki pasukan Belanda sehingga terjadi tabrakan dasyat. Sayangnya upaya

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 39.

nekat terakhir TNI menghentikan kereta api penyerang tersebut agak terlambat, karena sebelumnya pasukan Belanda telah turun di Jembatan Citarum sehingga tidak banyak menimbulkan korban di pihak pasukan Belanda. Di daerah Tanjungpura pasukan Belanda melakukan pembersihan dengan menembaki perkampungan dibantu oleh pesawat Mustang, sehingga banyak penduduk yang pergi mengungsi.

Hari itu juga pasukan tentara Belanda masih berupaya melalui jalan raya menduduki Karawang, ketika pasukan Belanda melewati jalan raya menuju kota Karawang, pasukan Belanda dihadang oleh TNI serta para pejuang sehingga terjadi pertempuran sengit.<sup>13</sup> TNI juga dengan sangat gigih mempertahankan diri di sekitar sebuah pabrik es di pinggir kota yang menyebabkan tentara Belanda kelelahan sehingga menghentikan penyerangan dan kembali ke ke Tanjungpura. Pada malam harinya, Komandan TNI menarik pasukan yang mempertahankan Karawang setelah membumihanguskan gedung-gedung penting di Karawang.<sup>14</sup>

“Mereka berhasil menyebrangi jembatan Kedunggedeh yang melintasi sungai Citarum terus menusuk jantung Karawang,” ujar Sidin, yang kala itu jadi pedagang beras.<sup>15</sup>

Dengan pasukan yang terlatih dan senjata yang canggih dalam satu minggu kota Bekasi, Karawang, Cikampek dan sekitarnya berhasil dikuasai oleh

---

<sup>13</sup> Kabupaten Karawang Tingkat II, *Draft Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang* (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II: Karawang, 1991), hal. 94-95.

<sup>14</sup> Pierre Heijboer, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>15</sup> "Serdadu Bumiputera Pembela Ratu Belanda", *Majalah Historia Nomor 29 Tahun III* (Jakarta: Media Historia Indonesia, 2016), hal. 22.

pasukan Belanda. Pasukan TNI yang meninggalkan Karawang sebagian kembali ke garis pertahanan yang kuat di pedalaman dan pegunungan.

Sedangkan serangan Agresi Militer Belanda dari arah Selatan yang berangkat melalui Cileungsi ke arah Cibarusa dan Karawang, Grup Brigade 2 mendapatkan banyak rintangan karena ulah TNI, jalan yang di lalui pasukan Belanda telah digarap sedemikian rupa sehingga kolonel pasukan Belanda pada hari pertama gerakan nyaris tidak dapat bergerak maju. Kompi Zeni lapangan 12 sepanjang hari disibukan menutup lubang di jalan, mengangkut batang pohon yang dirobokkan, dan memasang jembatan baru. Bahkan pada malam hari setelah siangya disibukan dan kelelahan para anggota Zeni harus terus bekerja guna memperbaiki jembatan terakhir yang dirusak sebelum Cibarusa agar dapat dilalui. Akibat hambatan tersebut, kolonel Selatan baru tiba di Karawang pada 23 Juli, sisa pasukan grup Brigade 2 sudah melanjutkan gerakan menuju sasaran lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Pierre Heijboer, *Op. Cit.*, hal. 42.

### C. Perjuangan Rakyat Karawang

Setelah Agresi Militer 1 yang dilancarkan oleh Divisi 7 Desember Tentara Belanda, Karawang berhasil di duduki oleh Belanda. TNI mundur ke daerah pedesaan yang tidak dapat dijangkau oleh tentara Belanda. Meskipun Karawang telah diduduki Belanda, tentara Republik tidak menyerah begitu saja, selanjutnya para tentara melakukan perang gerilya sesuai dengan perintah Panglima Divisi Siliwangi dengan melakukan penyerangan pada malam hari terhadap markas dan pos-pos Belanda, sehingga banyak tentara Belanda yang terbunuh kemudian persenjataan mereka berhasil direbut oleh TNI. Melalui perang gerilya pasukan Republik memiliki banyak keunggulan, diantaranya dengan menguasai medan serta potensi pertahanan. TNI semakin memperkuat pertahanan pasukan, upaya lainnya yang dilakukan TNI adalah dengan memutus hubungan tentara Belanda dengan pusat komando Belanda.<sup>17</sup>

Hal yang terpenting adalah mengkonsolidasi pemerintah sipil dan ketahanan rakyat untuk tetap berpihak pada Republik Indonesia, karena setelah Agresi Militer tersebut banyak masyarakat pergi untuk mengungsi. Agresi Militer mengakibatkan kehidupan rakyat menjadi tertekan, dan keadaan perekonomian masyarakat bertambah buruk. Selain melakukan Agresi, Belanda juga melakukan blokade ekonomi dengan sasaran utamanya adalah bahan makanan. Akibatnya rakyat banyak yang sengsara dan menderita.

---

<sup>17</sup> Kabupaten Karawang Tingkat II, *Op. Cit.*, hal. 95.

Aksi militer dihentikan pada tanggal 4 Agustus 1947 karena menimbulkan reaksi yang hebat dari Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan desakan agar Republik Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata dan mengadakan perundingan kembali, dengan terpaksa Belanda harus mengikuti resolusi Dewan keamanan PBB untuk melakukan gencatan Senjata.

Meskipun adanya desakan untuk melakukan gencatan senjata dari dunia Internasional, Belanda melaksanakannya hanya melalui jalan politik dan diplomatik saja tetapi tidak dalam militer, karena sejak Agustus hingga Desember 1947 Belanda terus melakukan operasi pembersihan terutama ke daerah-daerah basis gerilya. Kehadiran kekuatan-kekuatan pejuang tersebut telah menjadikan Karawang sebagai pusat kekuatan perjuangan rakyat melawan Belanda. Menyadari bahwa kekuatan para pejuang telah beralih ke daerah, maka Belanda mengirim mata-mata untuk mengetahui tempat dan jumlah kekuatan pejuang yang ada di daerah, pada saat itulah Belanda masuk ke wilayah-wilayah kantong pejuang di Karawang.

Dalam perjuangan kemerdekaan (1945-1949) yang terlibat di dalamnya bukan hanya kaum politisi atau militer saja, melainkan seluruh rakyat di Indonesia, termasuk di dalamnya perjuangan rakyat Karawang. Rakyat sebagai kekuatan massa terikat oleh kesatuan daerah, dalam hal seperti ini rakyat di desa dapat dipandang sebagai kekuatan politisi yang mampu memperkokoh diplomasi Internasional pemerintah Republik Indonesia karena suara rakyat sangat mempengaruhi dalam proses diplomasi. Selain itu, rakyat juga merupakan kekuatan logistik yang sangat dibutuhkan dalam perang gerilya, oleh sebab itu,

keterlibatan rakyat pedesaan dalam revolusi merupakan kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan hidup bernegara.<sup>18</sup>

Pemerintah Kabupaten Karawang yang semasa revolusi merupakan pemerintah gerilya banyak melibatkan kekuatan sosial-politik dan sosil-ekonomi masyarakat pedesaan yang relatif menguasai medan dan mempunyai logistik yang cukup baik. Masyarakat Karawang yang sebagian besar kehidupannya sebagai petani telah rela berkorban memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan perang gerilya, bahkan jiwa ragapun rela mereka korbankan demi kepentingan atau membela bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan ketika Desa rawagede dijadikan sebagai Markas Gabungan para Pejuang (MGP) dari berbagai kesatuan, rakyat Rawagede membantu dan memberikan segala kebutuhan yang diperlukan. Seperti, disediakannya tempat atau rumah untuk dijadikan sebagai markas, ada pula rakyat yang mau menjadi mata-mata untuk menyelidiki tentara Belanda, pekerjaan tersebut mengandung resiko karena apabila diketahui oleh Belanda, maka taruhannya adalah nyawa.<sup>19</sup>

Kehadiran tentara Belanda di Karawang telah melahirkan sikap kebencian rakyat terhadap Belanda, padahal Belanda mengatakan bahwa akan menjaga ketenangan dan ketertiban di daerah yang telah diudukinya. Penjagaan Belanda di dalam kota malah jauh dari keamanan dan ketertiban, di daerah Cikampek masyarakat justru merasa ketakutan sehingga jarang sekali masyarakat berjalan-jalan keluar rumah selain memiliki keperluan yang mengharuskannya keluar

---

<sup>18</sup> T. Bintang, *Catatan Sejarah Karawang Dari Masa Ke Masa* (Karawang: Viva Tanpas, 2007), hal. 106.

<sup>19</sup> *Ibid.*

rumah. Perhubungan antara desa dan kota menjadi sulit, jam malam di dalam kota berlaku dari pukul 6.30 malam hingga pukul 6.00 pagi.<sup>20</sup>

Apalagi setelah “Aksi Pembersihan” yang dilakukan pasukan Belanda untuk membersihkan ekstrimis-ekstrimis yang bergerilya melawan tentara Belanda. Penduduk Karawang khususnya di daerah Cikampek semakin takut untuk pergi keluar rumah sehingga membuat kota menjadi sangat sepi. Jumlah penduduk di daerah Cikampek belum diketahui pada saat itu, sebab belum diadakan penghitungan jiwa, tetapi selama Pemerintahan Republik jumlah penduduk semuanya berkisar 62.000 jiwa, jumlah tersebut kian jauh berkurang sebab ada 242 rumah yang dikosongkan, dan itupun hanya di daerah Cikampek saja, belum terhitung di daerah Karawang lainnya. Belanda juga mengeluarkan peraturan baru mengenai uang, rakyat diperintahkan menukarkan uang Republik dengan uang NICA, tetapi peraturan tersebut tidak digubris oleh rakyat karena mereka lebih menyukai uang ORI. Bencana kelaparanpun mulai mengancam, harga beras membumbung tinggi, masyarakat semakin menderita setelah Karawang berhasil diduduki oleh Belanda.<sup>21</sup> Hal tersebut menyebabkan banyaknya bentrokan antara rakyat, TNI dengan Tentara Belanda, rakyat karawang selalu mengadakan inisiatif penyerangan dan gangguan terhadap pos-pos Belanda

Pemerintah Belanda tidak pernah ingin menyebutkan bahwa tindakan pertikaian di Indonesia sebagai perang. Di dunia Internasional Belanda menutup kedoknya dengan mengatakan bahwa aksi militernya di Indonesia hanyalah aksi

---

<sup>20</sup>"Tjikampek Sepintas Lalu", *Antara Copyright*, 10 Desember 1947, hal. 8.

<sup>21</sup>*Ibid.*

polisional saja, mereka juga mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan urusan dalam negeri.<sup>22</sup> Akan tetapi, hakikatnya peristiwa itu adalah perang karena apa yang telah membuat perang menjadi kegiatan yang mengerikan ada. Dua angkatan bersenjata yang terorganisasi dengan kekuatan lebih dari 100.000 orang, pemerintah yang berpegang teguh pada pendirian masing-masing, sarana propaganda yang berfungsi sepenuhnya, kekerasan mekanis secara massal, penyiksaan, keberanian, pengorbanan, kecurangan, kekerdilan, diatas segalanya kesewenang-wenangan yang tidak manusiawi dari kematian.

---

<sup>22</sup> Garda Maeswara, *Op. Cit.*, hal. 142.